



Laporan Tahunan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016

BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT



**Badan Pemeriksa Keuangan
Perwakilan Provinsi Jawa Barat**

BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

VISI

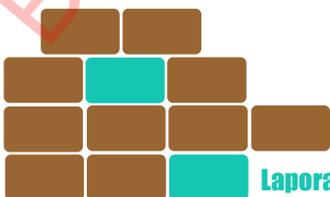
Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.

MISI

Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah secara bebas dan mandiri; dan
Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

TUJUAN STRATEGIS

Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan negara; dan
Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan negara.

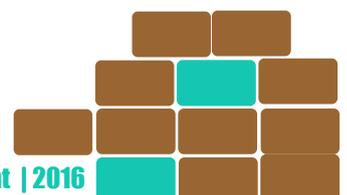


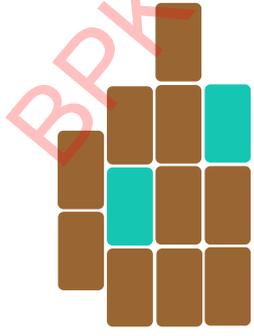
RENCANA STRATEGIS 2016 S.D. 2020

Renstra BPK 2016-2020 merupakan kelanjutan dari Renstra BPK 2011-2015, sehingga kondisi pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2015 menjadi salah satu pertimbangan penyusunan Renstra ini. Pertimbangan lain meliputi landasan pemikiran, perkembangan lingkungan strategis serta kondisi yang diharapkan dicapai lima tahun ke depan.

Renstra BPK 2016-2020 disusun dengan melibatkan seluruh jajaran di BPK. Oleh karena itu, keberhasilan dari Renstra ini ditentukan oleh peran aktif dari seluruh jajaran di BPK untuk mengimplementasikannya dan mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis serta target-target pengukurannya.

Kondisi yang diharapkan dalam Renstra BPK 2016-2020 terkait dengan peningkatan peran BPK dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk pencapaian tujuan negara. Peningkatan tersebut dilakukan dengan peningkatan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan serta peningkatan mutu kelembagaan BPK modern yang memanfaatkan sistem dan teknologi informasi.





ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI

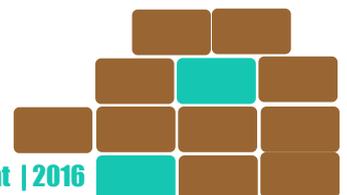


TUGAS DAN WEWENANG ANGGOTA BPK

No.	Pimpinan BPK	Tugas dan Wewenang	Objek Tugas dan Wewenang
1.	Ketua (merangkap Anggota)	<p>Melaksanakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Wakil Ketua; tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK; hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri; pembinaan pemeriksaan investigatif bersama dengan Wakil Ketua; dan pembinaan tugas Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua. 	Pelaksana BPK dan para pemangku kepentingan
2.	Wakil Ketua (merangkap Anggota)	<p>Melaksanakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua; pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, dan Inspektorat Utama; proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan; pembinaan pemeriksaan investigatif bersama dengan Ketua; dan pembinaan tugas Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Ketua. 	Pelaksana BPK dan para pemangku kepentingan
3.	Anggota I	<ul style="list-style-type: none"> melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif. 	Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Hukum dan HAM; Kementerian Pertahanan; Kementerian Perhubungan; Kejaksaan RI; Kepolisian Negara RI; Badan Intelijen Negara; Badan Narkotika Nasional; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Lembaga Ketahanan Nasional; Lembaga Sandi Negara; Komnas HAM; Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; KPU (termasuk KPU Daerah Prov/Kab/Kota); Badan SAR Nasional; Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas.

No.	Pimpinan BPK	Tugas dan Wewenang	Objek Tugas dan Wewenang
4.	Anggota II	<ul style="list-style-type: none"> melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif 	<p>Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Keuangan; Kementerian Perdagangan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS; Kementerian Koperasi dan UKM; Badan Koordinasi Penanaman Modal; Badan Pusat Statistik; Bank Indonesia; Otoritas Jasa Keuangan; Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; PT Perusahaan Pengelola Aset (termasuk pengelolaan aset-aset eks BPPN oleh Kemenkeu); Lembaga Penjamin Simpanan; Badan Standardisasi Nasional; Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas.</p>
5.	Anggota III	<ul style="list-style-type: none"> melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan melaksanakan koordinasi pemeriksaan investigatif 	<p>MPR, DPR, DPD, MA, BPK, MK, KY; Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Sekretariat Negara; Sekretariat Kabinet; Kementerian Sosial; Kementerian Pariwisata; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kementerian Pemuda dan Olahraga; Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Kementerian Agraria dan Tata Ruang; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Badan Pengawas Tenaga Nuklir; Badan Tenaga Nuklir Nasional; Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional; Perpustakaan Nasional RI; Badan Nasional Penanggulangan Bencana; Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil; Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; Badan Kepegawaian Negara; Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Lembaga Administrasi Negara; Arsip Nasional RI; Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno Jakarta; Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran; Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja; Lembaga Penyiaran Publik RRI; Lembaga Penyiaran Publik TVRI; Taman Mini Indonesia Indah; Badan Informasi Geospasial; Ombudsman RI; Badan Pertanahan Nasional; Badan Ekonomi Kreatif; Lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas.</p>
6.	Anggota IV	<ul style="list-style-type: none"> melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif 	<p>Kemenko Bidang Kemaritiman; Kementerian Pertanian; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Badan Pengatur Hilir Migas; Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo; Lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas.</p>

No.	Pimpinan BPK	Tugas dan Wewenang	Objek Tugas dan Wewenang
7.	Anggota V	<ul style="list-style-type: none"> • melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; • melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah; dan • memberikan pengarahannya pemeriksaan investigatif 	<p>Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Agama; Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang; Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam; Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura; Badan Nasional Pengelola Perbatasan; Lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas; Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah I, yang terdiri atas: Provinsi Aceh; Provinsi Sumatera Utara; Provinsi Sumatera Barat; Provinsi Riau; Provinsi Kepulauan Riau; Provinsi Jambi; Provinsi Sumatera Selatan; Provinsi Bengkulu; Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Provinsi Lampung; Provinsi Banten; Provinsi Jawa Barat; Provinsi DKI Jakarta; Provinsi Jawa Tengah; Provinsi DI Yogyakarta; Provinsi Jawa Timur; Lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas.</p>
8.	Anggota VI	<ul style="list-style-type: none"> • melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; • melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah; dan • memberikan pengarahannya pemeriksaan investigatif 	<p>Kementerian Kesehatan; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan); Badan Pengawas Obat dan Makanan; Lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas; Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II, yang terdiri atas: Provinsi Bali; Provinsi Nusa Tenggara Barat; Provinsi Nusa Tenggara Timur; Provinsi Kalimantan Barat; Provinsi Kalimantan Tengah; Provinsi Kalimantan Selatan; Provinsi Kalimantan Timur; Provinsi Kalimantan Utara; Provinsi Sulawesi Barat; Provinsi Sulawesi Selatan; Provinsi Sulawesi Tengah; Provinsi Sulawesi Tenggara; Provinsi Gorontalo; Provinsi Sulawesi Utara; Provinsi Maluku; Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas.</p>
9.	Anggota VII	<ul style="list-style-type: none"> • melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; • pemeriksaan investigatif 	<p>Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas); Badan Usaha Milik Negara dan anak perusahaan; Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan; Lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas.</p>



DAFTAR ISI

Bagian 1

Halaman	2	Visi, Misi, dan Tujuan Strategis
	3	Rencana Strategis 2016 s.d. 2020
	4	Anggota BPK RI
	5	Tugas dan Wewenang Anggota BPK

Bagian 2

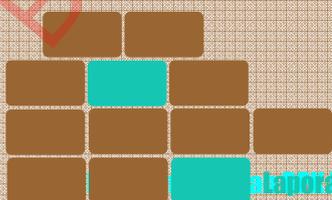
Halaman	10	Pengantar Kepala Perwakilan
	11	Tentang Perwakilan
		Struktur Organisasi
		Peta Strategi Perwakilan Jawa Barat
		Sasaran Strategis, IKU, & Target IKU

Bagian 3

Halaman	18	Grafis Sumber Daya Manusia
	22	Kinerja Perwakilan

Bagian 4

Halaman	33	Penutup
	34	Kaleidoskop 2016





TIM ARUMBA PERWAKILAN JABAR DI HUT BPK. JAKARTA



PENGANTAR KEPALA PERWAKILAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. Berkat ijin-Nya, kita masih diberikan kesehatan, kemampuan, dan kesempatan untuk berkarya bagi bangsa dan negara atas nama BPK.

Dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis BPK 2016 - 2020 , BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan serangkaian program kegiatan. Program tersebut diwujudkan dalam pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, serta kegiatan pendukung dan penunjang pemeriksaan.

Laporan Tahunan 2016 yang diterbitkan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat ini merupakan media informasi kinerja Perwakilan selama tahun 2016. Capaian tersebut tentunya tidak dapat diraih tanpa melalui kerja sama yang baik antara seluruh jajaran pimpinan dan staf di lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, Laporan Tahunan 2016 ini tidak hanya diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pencapaian Perwakilan selama tahun 2016, tetapi juga menjadi motivator penggerak guna tercapainya kinerja yang lebih baik di tahun-tahun mendatang. Utamanya, Perwakilan Provinsi Jawa Barat dapat semakin terpacu untuk meningkatkan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan, serta mewujudkan mutu kelembagaan BPK modern yang memanfaatkan sistem dan teknologi informasi sesuai dengan Rencana Strategis BPK 2016 - 2020.

Dengan segala keterbatasan kemampuan yang ada, kami sampaikan Laporan Tahunan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016. Semoga bermanfaat.

Bandung, Agustus 2017

Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat



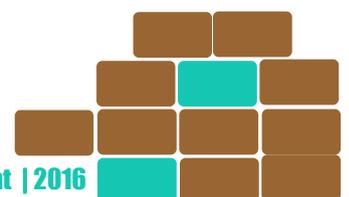
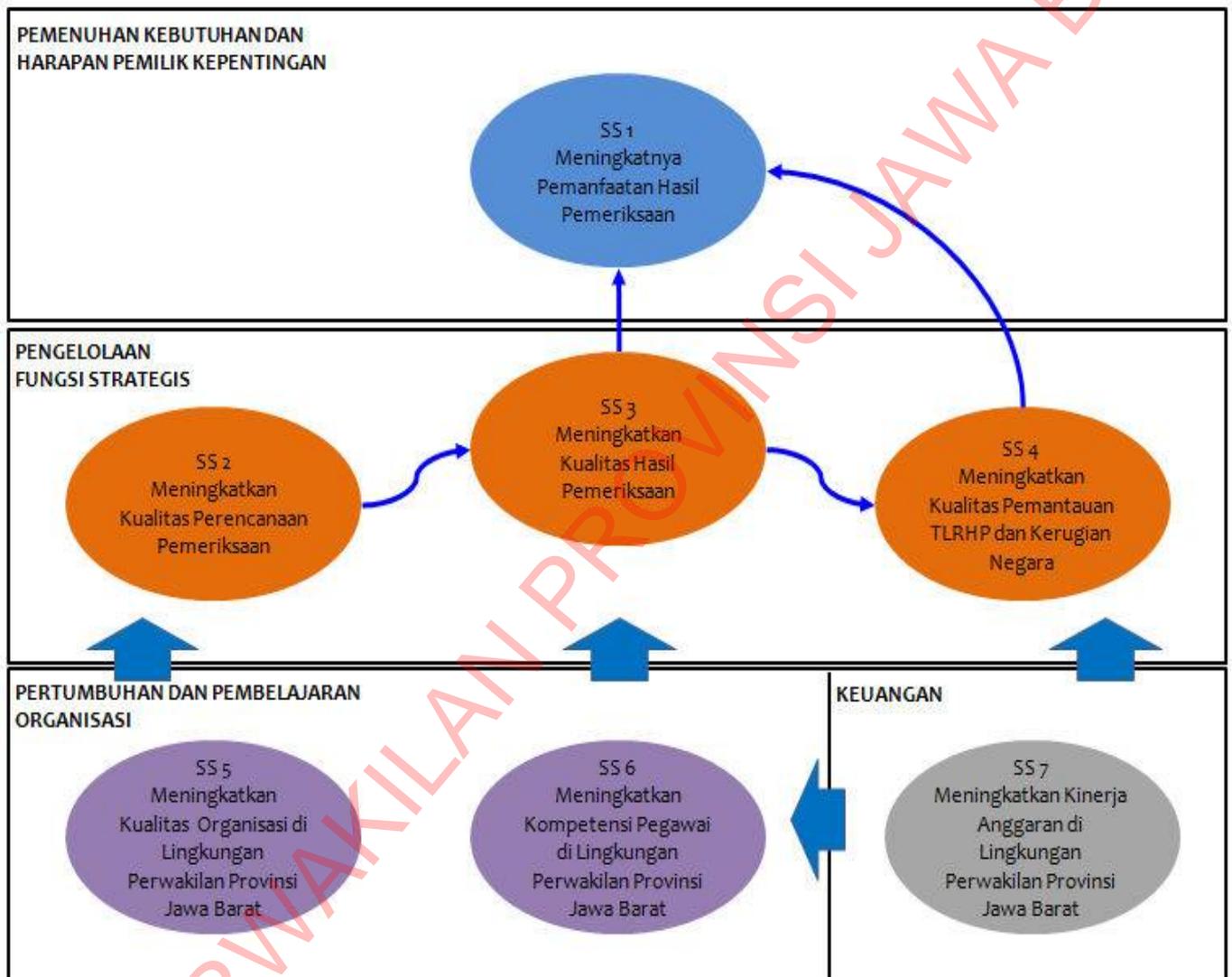
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

TENTANG PERWAKILAN

STRUKTUR ORGANISASI

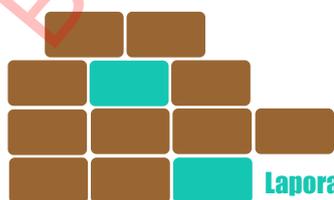


PETA STRATEGI PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT



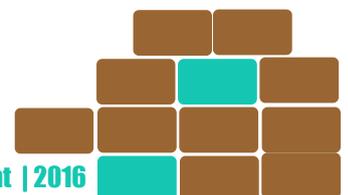
**Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target Pencapaian Indikator Kinerja Utama
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	
SS 1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	60%	
	IKU 1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,6	
	IKU 1.3	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	Mengarahkan, mengevaluasi dan memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan
	IKU 1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara	100%	
	IKU 1.5	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%	
	IKU 1.6	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	Merumuskan, mereviu dan menyiapkan bahan rumusan pendapat BPK
SS 2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IKU 2.1	Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%	Mengarahkan dan mengevaluasi perumusan rencana kegiatan perwakilan
	IKU 2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja seluruh LHP	15%	berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi perwakilan
	IKU 2.3	Ketetapan Waktu Penyampaian LHP	100%	Mengarahkan dan mengevaluasi kegiatan pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku
SS 3. Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IKU 3.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan	100%	Mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan program dan pengendalian kegiatan pemeriksaan
	IKU 3.2	Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%	
	IKU 3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%	Mengarahkan dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan IHPS
SS 4. Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IKU 4.1	Tingkat Kematakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	
	IKU 4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	56	Mengarahkan, mengevaluasi dan mengkompilasi kegiatan dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian Negara/daerah
	IKU 4.3	Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	



Lanjutan...

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	
SS 5. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	IKU 5.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat	A	Mengarahkan dan mengevaluasi rencana aksi dan kinerja perwakilan
	IKU 5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	Mengarahkan, mengevaluasi dan memantau kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan TI
	IKU 5.3	Persentase Penyusunan <i>Best-Practice</i>	0	
	IKU 5.4	Persentase Penyebaran <i>Best-Practice</i>	0	Mengarahkan dan mengevaluasi rencana aksi dan kinerja perwakilan
	IKU 5.5	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat	100%	
	IKU 5.6	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%	Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan berkala
	IKU 5.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2	Merumuskan, mereviu dan melaksanakan kegiatan humas
	IKU 5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	95%	Mengarahkan, mengevaluasi dan memantau kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sarpras
SS 6. Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	IKU 6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	Mengarahkan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan diklat pegawai
	IKU 6.2	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	90%	
SS 7. Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	IKU 7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	80%	Mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan layanan administrasi pemeriksaan





FAMILY GATHERING HUT BPK Ke-69, CIKOLE—LEMBANG



BPBK JABAR GOES TO SCHOOL—GARUT

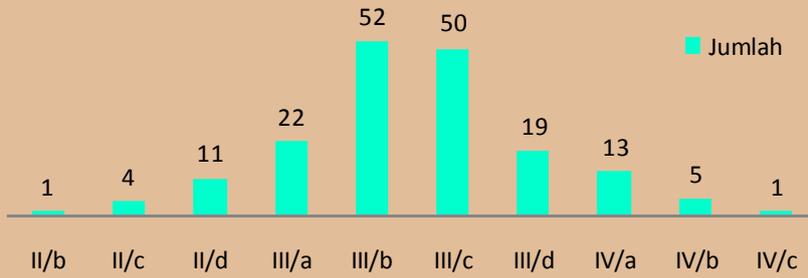
GRAFIS SUMBER DAYA MANUSIA BPK PROVINSI JAWA BARAT 2016



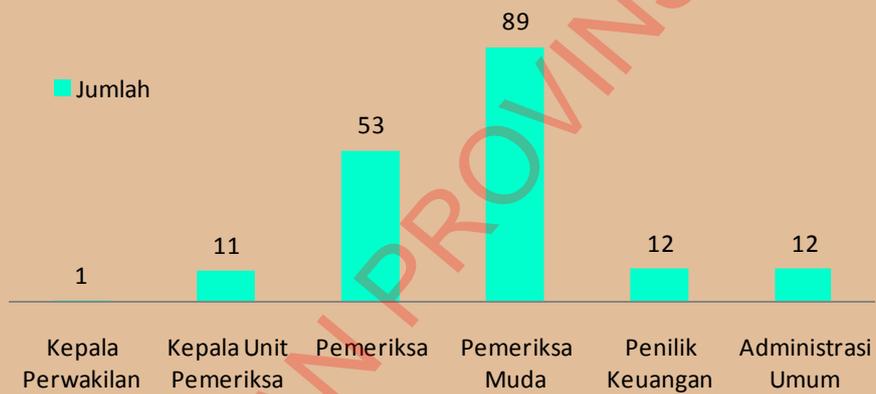
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



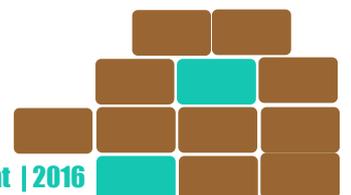
**Statistik Pegawai Tetap
Berdasarkan Golongan Kepangkatan**



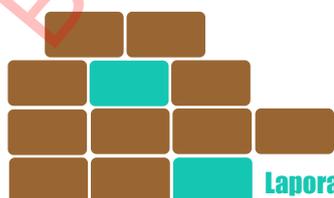
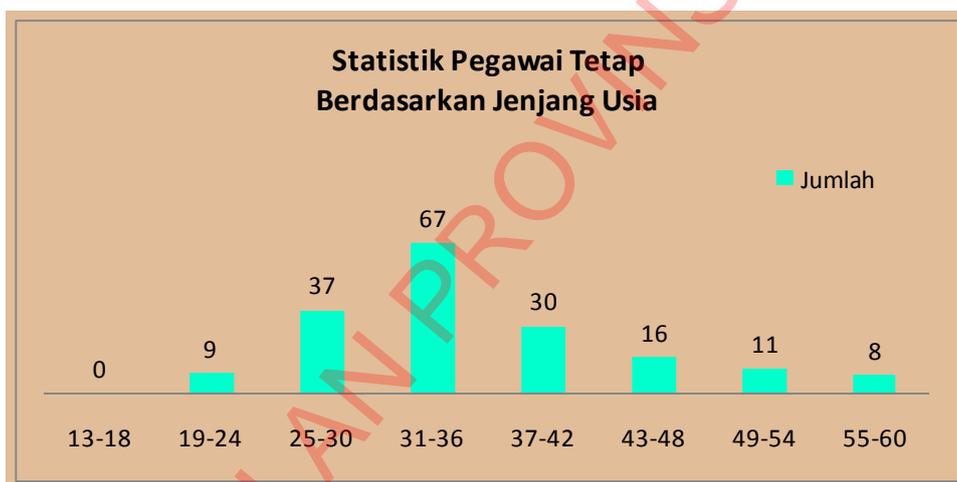
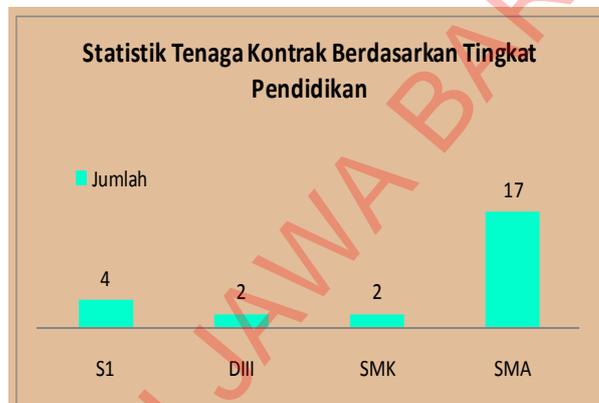
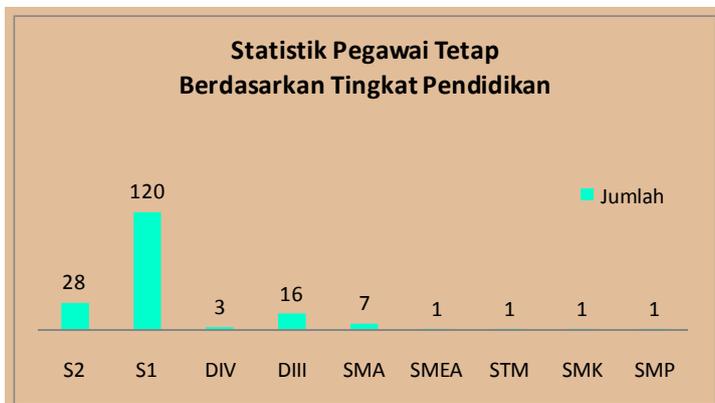
**Statistik Pegawai Tetap
Berdasarkan Jabatan Tertentu**



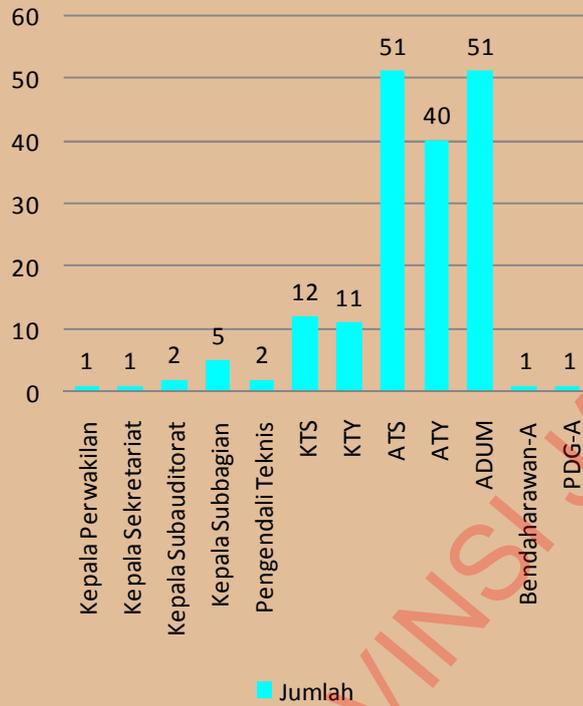
**Statistik Tenaga Kontrak
Berdasarkan Jenis Pekerjaannya**



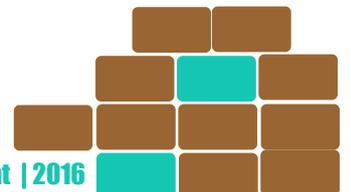
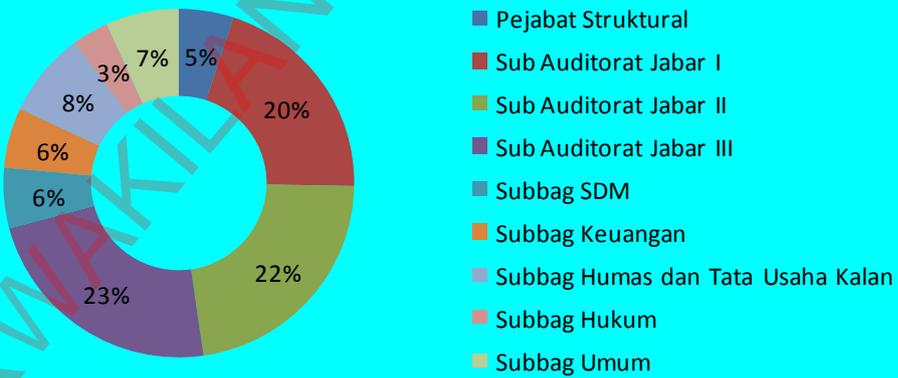
Berdasarkan data Bezzeting Subbagian Sumber Daya Manusia BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat per 31 Desember 2016, jumlah pegawai tetap adalah sebanyak 178 orang dengan komposisi laki-laki 117 orang dan perempuan 61 orang. Sedangkan jumlah pegawai tidak tetap adalah sebanyak 25 orang.



Statistik Pegawai Tetap berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional, dan Administrasi Umum



Statistik Pegawai Tetap berdasarkan Unit Kerja Perwakilan



KINERJA PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT 2016



Sesuai dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I.XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I.XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat terdiri dari:

Subauditorat Jawa Barat I

Bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Bandung Barat serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.

Subauditorat Jawa Barat II

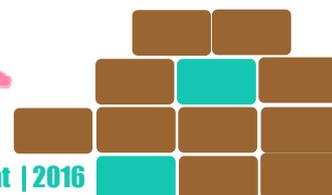
Bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Sumedang, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.

Subauditorat Jawa Barat III

Bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Pangandaran, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Depok serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.

Sekretariat Perwakilan

Bertugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Sekretariat Perwakilan membawahi Subbag Humas dan Tata Usaha, Subbag SDM, Subbag Keuangan, Subbag Umum dan Teknologi Informasi, dan Subbag Hukum.

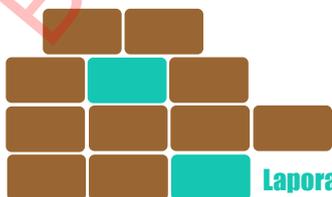


Pada tahun 2016, Perwakilan memperoleh pagu anggaran sebesar Rp43.070.557.000,00 dan sampai dengan bulan Desember 2016 telah direalisasikan sebesar Rp39.280.105.044,00 (91,20%). Secara rinci, perbandingan anggaran dan realisasi tersebut tersaji sebagai berikut.

Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
1	Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	23.275.726.000,00	20.598.033.886,00	88,50%
2	Pelayanan Kesekretariatan, Ke-humasan dan Kerjasama Luar Negeri	1.310.891.000,00	1.167.693.984,00	89,08%
3	Manajemen Sumber Daya Manusia	12.357.760.000,00	11.703.434.627,00	94,71%
4	Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Negara	608.152.000,00	606.099.999,00	99,66%
5	Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Layanan Umum	5.518.028.000,00	5.204.842.548,00	94,32%
Total Anggaran		43.070.557.000,00	39.280.105.044,00	91,20%

Realisasi tersebut dalam IKU 7.1 tentang Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat mencapai skor 105 atau melebihi target yang ditetapkan sebesar 80%. Berikut tren prosentase realisasi pencapaian IKU 7.1 dalam tiga tahun terakhir.

IKU	Uraian	Capaian		
		2016	2015	2014
7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	91,40%	93,13%	92,94%



RENCANA DAN REALISASI PEMERIKSAAN

No	Jenis Pemeriksaan	Rencana Pemeriksaan	Realisasi Pemeriksaan	Keterangan
1	LK	28	28	*28 Pemeriksaan Pendahuluan LKPD *28 Pemeriksaan Terinci LKPD
2	Kinerja	12	12	*3 Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja Revbangda: Kab. Cirebon, Kab. Karawang dan Provinsi Jawa Barat *3 Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja BUMD: Kota Bekasi, Kab. Bogor dan Provinsi Jawa Barat *3 Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja Saran dan Prasarana Provinsi Jawa Barat, Kab. Indramayu dan Kab. Tasikmalaya *3 Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja PBB Kab. Garut, Kab. Sumedang dan KBB *3 Pemeriksaan Terinci Kinerja Revbangda: Kab. Cirebon, Kab. Karawang dan Provinsi Jawa Barat *3 Pemeriksaan Terinci Kinerja BUMD: Kota Bekasi, Kab. Bogor dan Provinsi Jawa Barat *3 Pemeriksaan Terinci Kinerja PBB KBB, Kab. Sumedang dan Kab. Garut. *3 Pemeriksaan Terinci Kinerja Sarpras Provinsi Jawa Barat, Kab. Tasikmalaya dan Kab. Indramayu.
3	PDTT	41	41	*28 Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik *3 Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Kab. Pangandaran, Kota Depok, dan Kota Tasikmalaya *8 Pemeriksaan Belanja Kab. Purwakarta, Kab. Subang, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Majalengka dan Kab. Kuningan. *1 Penghitungan Kerugian Daerah bjb Karangampel Kab. Indramayu *1 Penghitungan Kerugian Daerah Aksara Sunda Provinsi Jawa Barat
	Jumlah	81	81	

SARANA DAN PRASARANA PERWAKILAN

Perkembangan nilai BMN selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut.

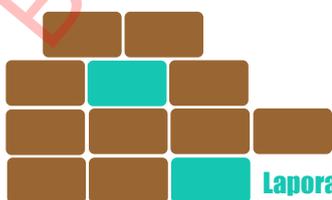
Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
		Rupiah	Persen
TA 2016	143.768.397.250,00	2.353.981.583,00	1,66
TA 2015	141.414.415.667,00	1.853.317.356,00	1,33
TA 2014	139.561.098.311,00	4.315.027.708,00	3,19
TA 2013	135.246.070.603,00	2.118.514.608,00	1,59
TA 2012	133.127.555.996,00	5.745.790.301,00	4,51

Nilai BMN per 1 Januari 2016 adalah sebesar Rp141.414.415.667,00, yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel sebesar Rp141.347.853.417,00 dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp66.562.250,00. Tidak terdapat perubahan penyajian saldo awal dalam penyajian laporan ini dengan saldo akhir periode sebelumnya yang menjadi saldo awal periode berjalan.

Berikut perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2016 per akun neraca.

No.	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan
1.	Persediaan	183.987.780,00	183.987.780,00
2.	Tanah	42.077.279.768,00	42.077.279.768,00
3.	Peralatan dan Mesin	34.671.519.235,00	34.671.519.235,00
4.	Gedung dan Bangunan	50.554.460.451,00	50.554.460.451,00
5.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	14.197.161.132,00	14.197.161.132,00
6.	Aset Tetap Lainnya	176.469.317,00	176.469.317,00
7.	KDP	0,00	0,00
8.	Aset Tak Berwujud	680.634.440,00	680.634.440,00
9.	Aset Lain-lain*)	1.160.322.877,00	1.160.322.877,00
	Total	143.701.835.000,00	143.701.835.000,00

*)Aset lain-lain pada Laporan Barang adalah nilai BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah.



PERMINTAAN PENDAPAT HUKUM

No.	Topik	Asal Surat
1	Temuan Pemeriksaan PDTT Aset pada Pemerintahan Kota Cirebon TA 2015 : "Pelepasan Aset Jalan Ciptomangunkusumo yang tidak sesuai Prosedur.	05/ND/XVIII.BDG.3/01/2016 tanggal 14 Januari 2016 Kasubaud Jabar II
2	Temuan Pemeriksaan PDTT Aset pada Pemerintah Kota Cirebon TA 2015: Konflik Tanah Pemerintah Kota Cirebon dengan Keraton Kesepuhan Cirebon Seluas 4.478 m ² , Minimal Senilai Rp 13.881.800.000 sudah dikuasai oleh Masyarakat dan Sisa Tanah Seluas 872 m ² Minimal Senilai Rp. 2.703.200.000 Belum Dilakukan Pengamanan oleh Pemerintah Kota Cirebon.	15/ND/XVIII.BDG.3/01/2016 tanggal 25 Januari 2016 Kasubaud Jabar II
3	Temuan Pemeriksaan Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp4.611.381.772,33 atas Kemahalan Harga Satuan Pekerjaan Jembatan pada Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya TA 2014	Nomor 07/PPD-KSO/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016 Propelat Prambanan Dwipaka KSO
4	Konsep Hasil Pemeriksaan Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah atas Dugaan Tindak Korupsi pada Bank BJB KCP Karang Ampel Kabupaten Indramayu Tahun 2014	Kepala Perwakilan
5	Temuan Pemeriksaan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Sukabumi Dengan Pihak Lain Belum Memberikan Manfaat, Pembongkaran Aset Tetap Gedung Dan Bangunan Senilai Rp49.254.751.000,00 Oleh Pihak Lain Tidak Sesuai Prosedur Dan Berpotensi Menimbulkan Kerugian Daerah Minimal Sebesar Rp19.500.000.000,00 Dan Atas Pemaparan Polres Sukabumi Mengenai Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penghapusan Bangunan Atau Aset Pasar Pelita, Pembangunan Dan Pengelolaan Pasar Pelita Pada Pemerintah Kota Sukabumi	Surat Nomor dari Polres Sukabumi Kota Nomor B/1417/IX/2016/Sat Reskrim tanggal 16 September 2016 perihal Permintaan Perhitungan Kerugian Negara
6	Temuan Pemeriksaan Penggunaan Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Tidak Sesuai Dengan Peruntukan Pada Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2014	Kepala Sub Auditorat Jabar 3



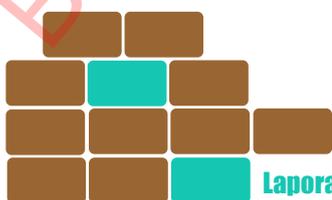
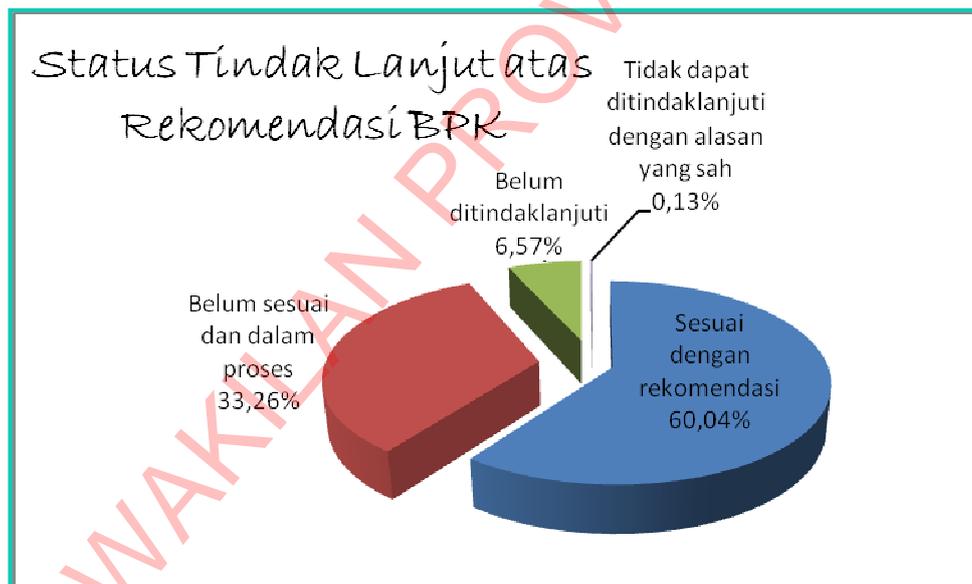
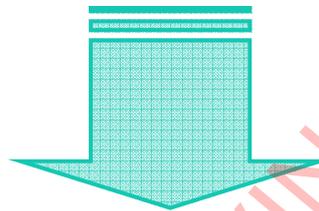
**ANGGOTA BPK BERSAMA KEPALA PERWAKILAN.
JELANG 'SIDANG BADAN' DI KANTOR PERWAKILAN BANDUNG**

Kegiatan permintaan pendapat hukum ke Ditama Binbangkum selama tahun 2016

No	Entitas	No & Tanggal Nota Dinas				Perihal
		Dari Perwakilan Ke AKN V	Dari AKN V Ke Ditama Binbangkum	Dari Ditama Binbangkum ke AKN V	Dari AKN V ke Perwakilan	
1	Provinsi Jawa Barat	197/ND/XVIII.BDG/06/2016, 28 Juni 2016		409/ND/XIII/08/2016, 02 Agustus 2016	617/ND/XVIII/08/2016, 09 Agustus 2016	Permohonan Pendapat Hukum atas Konsep Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Buku Aksara Sunda sebesar Rp3.980.826.013
2	Kabupaten Indramayu	297a/ND/XVIII.BDG/10/2016, 07 Oktober 2016	853/ND/XVIII/10/2016, 20 Oktober 2016			Permohonan Pendapat Hukum atas Konsep Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Bank BJB KCP Karang Ampel Kabupaten Indramayu Tahun 2014
		310/ND/XVIII.BDG/10/2016, 18 Oktober 2016				
3	Kota Sukabumi	311/ND/XVIII.BDG/10/2016, 18 Oktober 2016	862/ND/XVIII/10/2016, 26 Oktober 2016			Penyampaian Permintaan Pendapat Hukum atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi tentang Penghapusan Bangunan atau Aset Pasar Pelita, Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Pelita Kota Sukabumi.

TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK

No	Status Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK	Jumlah	Persentase (%)
1	Sesuai dengan rekomendasi	5.831	60,04%
2	Belum sesuai dan dalam proses	3.230	33,26%
3	Belum ditindaklanjuti	638	6,57%
4	Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah	13	0,13%
Jumlah Rekomendasi yang disampaikan		9.712	100%



PUSAT INFORMASI DAN KOMUNIKASI JABAR

Sebagai langkah dalam menghadapi era Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, BPK membangun PIK (Pusat Informasi dan Komunikasi) pada masing-masing Perwakilan yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Perwakilan. PIK ini menjadi sarana pelayanan dan pengelolaan informasi publik sebagaimana yang diamanatkan UU.

Permintaan Informasi Publik 2016				Pengaduan Masyarakat 2016			
1	Klasifikasi Pemohon			1	Klasifikasi Pengadu		
	Mahasiswa	49	50,52%		Individu	5	23,81%
	Instansi (APH, Kanwil, BPKP)	17	17,53%		Badan Hukum	9	42,86%
	Parpol	1	1,03%		Kelompok Orang	7	33,33%
	Perseorangan	3	3,09%	2	Topik Pengaduan		
	Media	7	7,22%		Permohonan Pemeriksaan	2	9,52%
	LSM	20	20,62%		Informasi Penyimpangan	16	76,19%
2	Data yang Dimohonkan				LHP	2	9,52%
	LHP	93	95,88%		Kepegawaian	1	4,76%
	Non LHP	4	4,12%	3	Mekanisme Pengaduan		
3	Mekanisme Permohonan				Surat	18	85,71%
	Surat	26	26,80%		Datang Langsung	3	14,29%
	Datang Langsung	71	73,19%	4	Tindak Lanjut		
4	Pemenuhan Data yang Dimohonkan				Penela	97	100%
	Dipenuhi	97	100%		Ditolak	0	0%
	Ditolak	0	0%				

Jumlah kegiatan *media relations* : 2 kegiatan.

Jumlah pengaduan masyarakat : 21 surat/dokumen.

Jumlah permohonan informasi publik : 97 permohonan.



23 Agustus – Media Workshop



20 Des – Talkshow TV. TVRI

19 Sept – Goes To School. Garut





FOTO BERSAMA KELUARGA BESAR BPK JABAR, JANUARI 2016

Laporan Tahunan 2016 ini merupakan informasi singkat tentang sumber daya, output yang dihasilkan, serta milestones keluarga besar

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

selama tahun 2016.

PENUTUP



KALEIDOSKOP 2016



JANUARI 2016





FEBRUARI 2016





MARET 2016





APRIL 2016





MEI 2016





JUNI 2016





JULI 2016





AGUSTUS 2016





SEPTEMBER 2016





OKTOBER 2016





NOVEMBER 2016





DESEMBER 2016 Kesuksesan





STOCKSHOT



BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Jl. Moch Toha No. 164
Bandung 40243
Telp. / Fax. 022-5207294/ 022-5207898